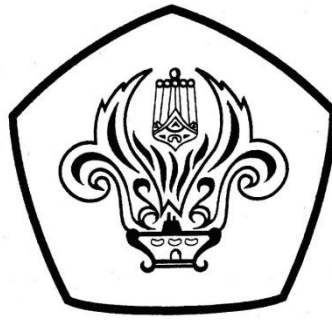




UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

SKRIPSI

**PENGARUH KEKUATAN MONOPOLI, ASIMETRI INFORMASI,
SERTA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP UPAYA
PENGADOPSIAN TEKNOLOGI *E-PROCUREMENT* DEMI
MEMINIMALKAN TINGKAT KORUPSI**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : DEWI ANASTASIA

NIM : 125120227

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

GUNA MENCAPAI GELAR

SARJANA EKONOMI

2016

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DEWI ANASTASIA

NO. MAHASISWA : 125120227

PROGRAM /JURUSAN : S1 / AKUNTANSI

BIDANG KONSENTRASI : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KEKUATAN MONOPOLI,
ASIMETRI INFORMASI, SERTA
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
TERHADAP UPAYA PENGADOPSIAN
TEKNOLOGI *E-PROCUREMENT* DEMI
MEMINIMALKAN TINGKAT KORUPSI

Jakarta, Mei 2016
Pembimbing

F.X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak. CA.

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

**PENGARUH KEKUATAN MONOPOLI, ASIMETRI INFORMASI, SERTA
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP UPAYA
PENGADOPSIAN TEKNOLOGI *E-PROCUREMENT* DEMI
MEMINIMALKAN TINGKAT KORUPSI**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengamati dan menguji pengaruh kekuatan monopoli, asimetri informasi, serta transparansi dan akuntabilitas terhadap upaya pengadopsian teknologi *e-procurement* demi meminimalkan tingkat korupsi pada instansi-instansi pemerintah yang terkait praktik teknologi *e-procurement* di Indonesia. Sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yang menghasilkan 196 kuesioner sebagai sampel. Penelitian lapangan dan kepustakaan telah dilakukan untuk mengetahui apakah upaya pengadopsian teknologi *e-procurement* dapat meminimalkan tingkat korupsi. Hasil penyebaran kuisisioner tersebut memperlihatkan bahwa pengadopsian teknologi *e-procurement* terbukti dapat menurunkan kekuatan monopoli dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang kemudian dapat mengurangi tingkat korupsi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode *Partial Least Square*.

The purpose of this study is to observe and examine the impact of monopoly of power, information asymmetry, transparency and accountability to intent to adopt e-procurement and corruption level of government institutions that adopting e-procurement technology in Indonesia. The research using purposive sampling method that brings 196 copies of quisionary as the sample. Field research and literature has been conducted to determine whether intent to adopt e-procurement affect corruption level. Result of distributing questionnaires showed that adopting e-procurement will decrease monopoly of power and increase transparency and accountability which then decrease corruption level. Hypothesis test is done by the method of Partial Least Square analysis.

Keywords: *Monopoly of Power, Information Asymmetry, Transparency, Accountability, E-procurement, Corruption Level, Partial Least Square*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Ruang Lingkup	4
D. Perumusan Masalah	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Teori Ketergantungan Terhadap Sumber Daya	8
2. Teori Difusi Inovasi	9
3. Teori Agensi	11
4. Sistem Informasi	11
5. <i>E-government</i>	12
6. <i>E-procurement</i>	13
7. Kekuatan Monopoli	14

8. Asimetri Informasi	15
9. Transparansi dan Akuntabilitas	16
10. Korupsi	16
B. Penelitian Terdahulu	17
C. Kerangka Pemikiran	18
D. Hipotesis	19

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Objek Penelitian	20
B. Metode Penarikan Sampel	20
1. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel	20
2. Operasional Variabel	22
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Pengolahan Data dan Pengujian Hipotesis	32
1. Uji Statistik	33
2. Uji Validitas	33
3. Uji Reliabilitas	34
4. Uji Model Struktural	34

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Unit Observasi	40
1. Karakteristik Responden	42
B. Analisis dan Pembahasan	44
1. Statistik Destriptif	44
2. Pengujian <i>Outer Model</i>	46

3. Pengujian <i>Inner Model</i>	58
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	78
B. Keterbatasan	81
C. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	24
Tabel 4.1 Pengambilan Sampel Kuisisioner	40
Tabel 4.2 Sampel Responden Penelitian	41
Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden	42
Tabel 4.4 Kisaran Usia Responden	42
Tabel 4.5 Pendidikan Responden	43
Tabel 4.6 Pengalaman Kerja	43
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.8 <i>Loading Factor Monopoly of Power</i>	47
Tabel 4.9 <i>Loading Factor Information Asymmetry</i>	49
Tabel 4.10 <i>Loading Factor Transparency and Accountability</i>	50
Tabel 4.11 <i>Loading Factor Intent to Adopt E-procurement</i>	51
Tabel 4.12 <i>Loading Factor Corruption Level</i>	53
Tabel 4.13 Hasil Cross Loading	54
Tabel 4.14 AVE	56
Tabel 4.15 <i>Composite Reliability</i>	57
Tabel 4.16 <i>Cronbach Alpha</i>	57
Tabel 4.17 <i>R square</i>	58
Tabel 4.18 <i>Path Coefficients</i> Hipotesis 1, 2, dan 3	59
Tabel 4.19 <i>Path Coefficient</i> Hipotesis 4 dan 5	63
Tabel 4.20 <i>Indirect Effect</i>	68
Tabel 4.21 <i>Total Effect</i>	68

Tabel 4.22 <i>Construct Crossvalidated Redudancy</i>	69
Tabel 4.23 <i>Construct Crossvalidated Redudancy (Q² included)</i>	73
Tabel 4.24 Hasil perhitungan Q ² tanpa konstruk <i>Monopoly of Power</i>	73
Tabel 4.25 Hasil perhitungan Q ² tanpa konstruk <i>Information Asymmetry</i>	74
Tabel 4.26 Hasil perhitungan Q ² tanpa konstruk <i>Transparency and Accountability</i>	75
Tabel 4.27 Hasil perhitungan Q ² tanpa konstruk <i>Transparency and Accountability</i>	76
Tabel 4.28 Hasil perhitungan Q ² tanpa konstruk <i>Intent to Adopt E-procurement</i>	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Stages in the innovation-decision process	10
Gambar 2.2 E-procurement <i>Critical Success Factor (CSF)</i> Model	14
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran (Paradigma Pemikiran)	19
Gambar 3.1 Model Penelitian	35
Gambar 4.1 Hasil Output MP	47
Gambar 4.2 Hasil Output IA	48
Gambar 4.3 Hasil Output TA	50
Gambar 4.4 Hasil Output ITA	51
Gambar 4.5 Hasil Output COR	52
Gambar 4.6 Hasil Output Algoritma PLS Full Model	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Penelitian

Lampiran 2 Surat Pengantar

Lampiran 3 Kuisisioner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Tindakan korupsi sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan kepentingan umum tapi juga negara. Oleh karena itu, berbagai negara di dunia berusaha mencari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan internet untuk penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan *e-government*.

E-procurement merupakan salah satu contoh penerapan *e-government* di Indonesia yang berfungsi untuk mempermudah pelelangan proyek. Teknologi *e-procurement* diyakini sebagai salah satu solusi untuk mengatasi praktik korupsi yang tak jarang ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan *e-procurement* proses pelelangan terjadi secara *online* sehingga diharapkan dapat meminimalkan terjadinya tindakan korupsi.

Kaufmann (dalam Mistry dan Jalal, 2012: 149) menyebutkan kekuatan monopoli serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Dalam teori *principal-agent* disebutkan asimetri informasi yang kerap timbul juga mendorong terjadinya korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan

Rahman (2015) serta Neupane, *et al.* (2014), ditemukan bahwa kekuatan monopoli memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya penerapan *e-procurement* dalam mengurangi terjadinya korupsi. Amagoh (2009) menemukan bahwa asimetri informasi muncul dalam proses pelelangan namun dapat dikurangi dengan pengontrolan/ monitor kepada agen. Penelitian yang dilakukan oleh Song (2002) serta Neupane, *et al.* (2014) menemukan bahwa implementasi *e-procurement* dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi.

Panda, *et al.* (2010), Bertot, *et al.* (2012) serta Neupane, *et al.* (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Singla dan Aggarwal (2011), Iqbal dan Seo (2008), Pathak, *et al.* (2007), serta Mistry dan Jalal (2012) juga menunjukkan bahwa *e-governance (e-procurement)* dapat mengurangi korupsi. Selain itu dalam penelitian Park and Blenkinsopp (2011), Lindstedt dan Naurin (2006), serta Balsevich, *et al.* (2011) ditemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang signifikan terhadap korupsi. Namun Wescott (dalam Kim, *et al.*, 2009: 43) berpendapat bahwa penggunaan IT tidak menutup kemungkinan dapat mengarah pada peningkatan “ketrampilan” dalam korupsi dikarenakan korupsi yang sudah berakar pada budaya, politik dan ekonomi. Dalam penelitian Schuppan (2009) ditemukan bahwa ketika faktor politik dan administrasi tidak sejalan dengan *e-government*, maka implementasi *e-government* dapat berujung pada korupsi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KEKUATAN

MONOPOLI, ASIMETRI INFORMASI, SERTA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP UPAYA PENGADOPSIAN TEKNOLOGI *E-PROCUREMENT* DEMI MEMINIMALKAN TINGKAT KORUPSI” untuk diuji secara empiris.

B. Identifikasi Permasalahan

Bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap sebagai “lahan basah” karena praktik korupsi tak jarang ditemukan dalam bidang ini. Tak dapat dipungkiri masyarakat pun memiliki kecurigaan dan keraguan akan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Permainan kekuatan monopoli dan pemanfaatan asimetri informasi serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menyebabkan tindak korupsi merajalela. Untuk itu munculnya sistem *e-procurement* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memudahkan proses kegiatan dalam instansi pemerintah, juga diharapkan dapat menekan tingkat korupsi. Namun dalam kenyataannya masih kerap ditemui terjadi tindak korupsi walau sistem ini sudah berjalan dari tahun 2008 atas dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh pengaruh kekuatan monopoli, asimetri informasi, serta transparansi dan akuntabilitas terhadap upaya pengadopsian *e-procurement* demi meminimalkan tingkat korupsi.

C. Ruang Lingkup

Dalam pembahasan ini, akan dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian. Masalah yang akan dianalisis adalah pengaruh kekuatan monopoli, asimetri informasi, serta transparansi dan akuntabilitas terhadap tujuan pengadopsian *e-procurement* dan tingkat korupsi pada lembaga pemerintah. Data penelitian akan diperoleh dari personil pada institusi pemerintah di Indonesia. Pembatasan ruang lingkup dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga penulis.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah *monopoly of power* berpengaruh positif terhadap *intent to adopt e-procurement*?
2. Apakah *information asymmetry* berpengaruh positif terhadap *intent to adopt e-procurement*?
3. Apakah *transparency and accountability* berpengaruh positif terhadap *intent to adopt e-procurement*?
4. Apakah *intent to adopt e-procurement* berpengaruh negatif terhadap *corruption level*?
5. Apakah *transparency and accountability* berpengaruh negatif terhadap *corruption level*?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain untuk memberikan bukti dan analisis mengenai:

1. Pengaruh positif *monopoly of power* terhadap *intent to adopt e-procurement*
2. Pengaruh positif *information assymetry* terhadap *intent to adopt e-procurement*
3. Pengaruh positif *transparency and accountability* terhadap *intent to adopt e-procurement*
4. Pengaruh negatif *intent to adopt e-procurement* terhadap *corruption level*
5. Pengaruh negatif *transparency and accountability* terhadap *corruption level*

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi kepada pemerintah dalam mengatasi praktik korupsi yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa serta memberikan sumbangan ilmiah dalam perkembangan *e-procurement*.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan teknologi *e-procurement* pada masyarakat luas dan meminimalisasi kecurigaan dan keraguan masyarakat dalam hal pengadaan barang dan jasa.

F. Sistematika Pembahasan

Penyajian skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, di mana setiap bab memberikan gambaran sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisi pembahasan teori dan pendapat para ahli mengenai kekuatan monopoli, asimetri informasi, transparansi dan akuntabilitas, *e-procurement*, dan korupsi disertai dengan kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan. Selain itu juga terdapat model penelitian dari variabel yang akan diuji dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang pemilihan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan yang terdiri atas dua bagian yaitu gambaran umum unit observasi dan analisa hasil penelitian. Gambaran umum unit observasi akan membahas variabel penelitian, lokasi penelitian dan sebagainya. Sedangkan analisa hasil penelitian berisi bahasan atas hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amagoh, Francois (2009). Information asymmetry and the contracting out process. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*. 14. (2). 1-14
- Azmi, Khairul S. A. & Rahman, Alifah A. L. A. (2015). E-procurement: A tool to mitigate public procurement fraud in Malaysia?. *The Electronic Journal of e-Government*. 13. (2). 150-160
- Balsevich, Anna, Pivovarova, Svetlana & Podkolzina, Elena (2011). Information transparency in public procurement: How it works in Russian regions. 1-34
- Bertot, John C., Jaeger, Paul T., & Grimes, Justin M. (2012). Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government. *Transforming Government: People, Process and Policy*. 6. (1). 78-91
- Bhatnagar, Subhash (2003). The economic and social impact of e-government. 1-39
- Croom, Simon R. & Jones, Alistair B. (2005). Key issues in e-procurement: Procurement implementation and operation in the public sector. *Journal of Public Procurement*. 5. (3). 367-387
- Davila, A., Gupta, M. & Palmer, R. (2003). Moving procurement systems to the internet: The adoption and use of e-procurement technology models. *European Management Journal*. 21 (February). (1). 11–23
- Davis, Gerald F. & Cobb, J. Adam (2009). Resource dependence theory: Past and future. *Research in the Sociology of Organizations*. (April). 1-31
- Dirienzo, Cassandra E. *et al* (2007). Corruption and the role of information. *Journal of International Bussiness Studies*. 38. 320-332

Finkle, Aaron (2005). Relying on information acquired by a principal. *International Journal of Industrial Organization*. 263-278

Ghozali, Imam (2011). *Structure Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1-296

Gronlund, Ake (2010). Using ICT to combat corruption. (eds) *Increasing transparency and fighting corruption through ICT empowering people and communities*. (3). Stockholm: Spider. 7-31

Hillman, Amy J. *et al* (2009). Resource dependence theory: a review. *Journal of Management*. 35. (6). 1404–1427

Iqbal, M. Sohel & Seo, Jin-Wan (2008). E-governance as an anti-corruption tools: Korean Cases. *Journal of Korean Association for Regional Information Society*. 6. 51-78

Jensen, Michael C. & Meckling, William H. (1976). Theory of the firm: Managerial behaviour, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. (3). 305-360

Jogiyanto H.M., (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.

Kim, Seongchol, Kim, Hyun Jeong, & Lee, Heejin (2009). An institutional analysis of an e-government system for anti-corruption: The case of OPEN. *Government Information Quarterly*. (26). 42-50

Lindstedt, Catharina & Naurin, Daniel (2006). Transparency against corruption. 1-38

Mistry, Jamshed J. & Jalal, Abu (2012). An empirical analysis of the relationship between e-government and corruption. *The International Journal of Digital Accounting Research*. 12. 145-176

Neupane, A., Soar, J., Vaidya, K., & Yong, J. (2012). Role of public e-procurement technology to reduce corruption in government procurement. *International Public Procurement Conference*. (August), Seattle, Washington. 304-334

_____. Soar, J., & Vaidya, K., Aryal, S. (2014). The potential of ICT tools to promote public participation in fighting corruption, in Information Resources Management Association. (eds) *Business law and ethics: concepts, methodologist, tools, and application*. Hershey PA, USA: Business Science Reference. 338-354

_____, Soar J., & Vaidya, K. (2014). An empirical evaluation of the potential of public e-procurement to reduce corruption. *Australasian Journal of Information System*. 18. (2). 21-44

Panda, P., Sahu, G.P. & Gupta, P. (2010). Promoting transparency and efficiency in public procurement: E- procurement initiatives by government of india. 7th International Conference on E-Government (ICEG) 2010, 22-24 Apr 2010, IIM Bangalore, India. 1-11

Park, H. and Blenkinsopp, J. (2011). The roles of transparency and trust in the relationship between corruption and citizen satisfaction. *International Review of Administrative Sciences*. 77. (2). 254-274

Pathak, R. D. *et al* (2007). Governance and corruption-developments and issues in Ethiopia. *Public Organization Review*. 7. (3). 1-27

Pfeffer, Jeffrey & Salancik, Gerald R. (2003). *The external control of organization: A resource dependence perspective*. California: Stanford University Press.

Ramanujam, P. G. (2012). E-government : Strategies for successful e-procurement. *International Journal of Engineering and Management Sciences*. 3. (1). 53-59

Rogers, Everret M. (2003). *Diffusion of innovation*. 3rd edition. New York: The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.

- Salehi, Mahdi, Rostami, Vahab & Mogadam, Abdolkarim (2010). Usefulness of accounting information system in emerging economy: empirical evidence of Iran. *International Journal of Economics and Finance*. 2 (May). (2). 186-195
- Schuppan, Tino (2009). E-government in developing countries : Experiences from sub-saharan Africa. *Government Information Quarterly*. (26). 118-217
- Singla, Sushil K. & Arggawal, Himanshu (2011). Combating corruption through e-governance in public service delivery system. *Journal of Global Research in Computer Science*. 2 (July). (7). 96-100
- Smith, Robert W. & Bertozzi, Mark (1998). Principals and agents: An explanatory model for public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. 10. (3). 325-353
- Song, Hee Joon (2002). Prospects and limitations of the e-government initiative in Korea. *International Review of Public Administration*. 7 (December). (2). 45-53
- Soreide, Tina (2002). Corruption in public procurement: Causes, consequences, and cures. Chr. Michelsen Institute, Report 2002: 1
- Umar, Husein (2003). Metode riset bisnis: Panduan mahasiswa untuk melaksanakan riset dilengkapi contoh proposal dan hasil riset bidang manajemen dan akuntansi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1-336
- Vaidya, Kishor, Sajeev, A. S. M. & Callender, Guy (2006). Critical factors that influence e-procurement implementation success in the public sector. *Journal of Public Procurement*. 6. 70-99
- Zhang, Jian & Zhang, Zengtian (2009). Applying e-government information system for anti-corruption strategy. *International conference on management of e-commerce and e-government*. 112-115